Muqaddimah

Jurnal Studi Islam

Dengan Amar Ma'ruf, Nahi Munkar, dan Kreatif
Universitas Ibnu Chaldun Jakarta
Maju Bersama

Drs. H. A. Fattah Zoeny, MA, M.Mpd

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

DAFTAR ISI

JURNAL MUQADIMAH DITERBITKAN OLEH
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

PELINDUNG : ALFAN AMURA
KETUA YKSYAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

PENANGGUNG JAWAB : H. A. HAMID SUCHAS
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA
MOCH SYARIFIN MALOKO, SH. MM
KETUA ALUMNI UNIV. IBNU CHALDUN JAKARTA

PENGARAH :
ABDUS SUPRIADI, PANINDYO, MUSTAFAKADRI

PEMIMPIN UMUM :
Drs. H. A. FATTAH ZOENY, MA

WAKIL PEMIMPIN UMUM :
Drs. H. HARTINI, MM

PEMIMPIN REDAKSI :
Drs. H. HUSNAR, M.Pd

REDAKTUR PELAKSANA :
Drs. H. M. SALEH IDRIS, M., M.Pd

WAKIL REDAKTUR PELAKSANA :
Drs. H. A. HERYADI, M.Pd

SEKRETARIS REDAKSI :
RIZALDI SHAHRIL R.

STAF AHLI :
ANAS YANUN, UHREN LUKMAN, ARTINE SOEPARNO,
YUNUS SULCHAN, DADANG IFFAN, AMNUDDIN,
HAYDIN, SUHARDIN, YUMNI AL-HILAL

STAF REDAKSI :
MAHYUDDIN HUSEIN, MUZAHRIDIN

DESIGN GRAFIS :
ERCO

DISTRIBUTOR :
WAHIDIN, EDI SUHADI, QURRATULANIM,
NYI SURYANI

FOTOGRAFER :
LUTFI EFFENDI

BENDAHARA :
WAYAN ENDANG MARLIANTI

ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA :
JL. PERLUCAI I KAW. 67 RAWA MANSUN JAKARTA
TELEFON : (021) 4722059
4702563, 4702564

- Islam Modern Di Tunisia
Drs. H. Abdul Fattah Zoeny, MA
- Rekonstruksi Peradaban Islam Di Era
Gloalisasi
M. Saleh Idris
- Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia
Ubaiddillah, MA
- Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Melalui Penyuluhan Agama
Drs. H. Hartini, MM
- Birokrasi, Lingkungan dan Budaya Organisasi
Drs. H. Huanier, M.Pd
- Peningkatan Kepedulian Terhadap Lingkungan
Dengan Pemanfaatan Limbah / Sampah
Suhardin, S.Ag, M.Pd
- Strategi Dakwah
Ir. Zainuddin Rachman, M.Pd
- Dakwah Dan Perubahan Sosial
H. Yumni Al-Hilal, MA
- Nilai-nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Abd. Hanan SH, MH.
- Fenomena Sain Modern Dalam Al-Qur'an Dan
Hadis Nabi
Abu Huraifah Abd. Salam MA
- Pertolongan Pada Kasus Pidana (P3K)
Muhajirin Tohir
- Aspek Hukum Kerahasiaan Promosi Dan Kampanye
Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit
Hiv/Aids
Drs. H. Andri Heryadi, M.Pd
- Imamah Dalam Wacana Demokrasi
Yusuf, S.Ag, M.Ag
- Ilmu Pengetahuan
Hilman Nurfitri, MA
- Ki Hajar Dewantara Seorang Praktisi Pendidikan
di Indonesia
M. Siddiq A.K., S.Sos, MSi
- Metodologi Penelitian Islam
Diakwan, MA
- Prinsip-prinsip Mempertahankan Kesuksesan
Yang Kekal Berdasarkan The Principles Of
Enduring Success
Achmad Khotib, S.Sos
- Memahami Gagasan Dibalik Corporate Social
Responsibility
Aadi Caniago

Ki Hadjar Dewantara SEORANG PRAKTISI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh :

Mohammad Siddiq Abdul Kholiq, S.Sos, M.Si
Dosen Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

A. BIOGRAFI KI HADJAR DEWANTARA

Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara, dilahirkan pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia berasal dari lingkungan keluarga Kraton Yogyakarta. Setelah menamatkan ELS (Sekolah Dasar Belanda), ia meneruskan pelajarannya ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Ia kemudian menulis untuk berbagai surat kabar seperti *Sedyotomo*, *Midden Java*, *De Express* dan *Utusan Hindia*.

Ia tergolong penulis tangguh pada masanya; tulisan-tulisannya sangat segar dan patriotik serta mampu membangkitkan semangat anticolonial bagi pembacanya. Selain menjadi seorang wartawan muda RM Soewandi juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, ini terbukti di tahun 1908 dia aktif

di Budi Oetama dan mendapat tugas yang cukup menantang di seksi propaganda.

Perkenalannya dengan Drs. Danudirdja Setyabudhi (F.F.E Douwes Dekker), Dr. Cipto Mangunkusumo dan Abdul Muis melahirkan gagasan baru untuk mendirikan partai politik yang beraliran nasionalisme Indonesia, yakni Indische Partij. Partai yang berdiri pada tahun 1912 ini memiliki keyakinan bahwa nasib masa depan penduduk Indonesia terletak di tangan mereka sendiri, karena itu kolonialisme harus dihapuskan. Namun sayang, status badan hukumnya ditolak oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Mereka bertiga kemudian membentuk Komite Bumiputera, sebuah organisasi tandingan dari komite yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda.

Bersamaan dengan itu, RM Soewardi kemudian membuat sebuah tulisan berjudul "Als is eens een Neerlandier was" (Andai Aku Seorang Belanda) yang dimuat dalam surat

kabar de Express milik Dr. Douwes Dekker, pada tahun 1913. artikel ini ditulis dalam konteks rencana pemerintah Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda (Indonesia), yang saat itu masih belum merdeka, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Meski demikian, selain kritik keras terhadap sikap pemerintah kolonial, artikel tersebut telah pula mengajarkan tentang harapan dan aspirasi akan kemerdekaan bagi kaum bumiputera.

Kutipan tulisan tersebut antara lain:

"Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Seajara dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantonnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa Inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun"

Gagasan Ki Hadjar tentang nasionalisme selanjutnya ikut mewarnai

gerakan sosial politik tentang kolonialisme Belanda. Pemikiran-pemikiran Ki Hadjar bukan saja mendapat tantangan keras dari pemerintah kolonial, tetapi juga memicu perdebatan di kalangan intelektual bumiputera sendiri. Perdebatan tentang kebudayaan tersebut dikenal dengan sebutan Polemik Kebudayaan. Secara garis besar, perdebatan itu berlangsung di antara mereka yang disebut kaum modernis dengan kelompok yang dianggap mewakili kaum tradisional.

Tulisan yang dimuat dalam koran de Express milik Dr. Douwes Dekker ini dianggap menghina oleh Pemerintah Belanda sehingga keluar keputusan hukuman bagi beliau untuk diasingkan ke Pulau Bangka. Usaha pembelaan yang dilakukan Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak membawa hasil, bahkan mereka berdua terkena hukuman pengasingan juga. Karena menganggap pengasingan di pulau terpencil tidak membawa manfaat banyak, mereka bertiga meminta kepada Pemerintah Belanda untuk diasingkan ke negeri Belanda. Pada masa inilah kemudian RM Soewardi banyak mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di Belanda hingga mendapat sertifikasi di bidang ini.

Setelah pulang dari pengasingan, RM Soewardi bersama rekan-rekan seperjuangan mendirikan *Nationaal Ondewirjs* Institut atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. perguruan itu bercorak nasional dan berusaha menanamkan rasa kebangsaan dalam jiwa anak didik. Pernyataan asas dari Taman Siswa berisi 7 pasal yang memperlihatkan bagaimana pendidikan itu diberikan, yaitu untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggung jawab, agar anak-anak berkembang merdeka dan menjadi serasi, terikat erat kepada milik budaya sendiri sehingga terhindar dari pengaruh yang tidak baik dan tekanan dalam hubungan kolonial, seperti rasa rendah diri, ketakutan, keseganan dan peniruan yang membuta. Selain itu anak-anak didik menjadi putra tanah air yang setia dan bersemangat, untuk menanamkan rasa pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam pendidikan ini nilai rohani lebih tinggi dari nilai jasmani.

Pada tahun 1930 asas-asas ini dijadikan konsepsi aliran budaya, terutama berhubungan dengan polemik budaya dengan Pujangga Baru. Selain mencurahkan dalam dunia pendidikan secara nyata di Tamansiswa, RM Soewardi juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisan-tulisannya beralih

dari nuasan politik ke pendidikan dan kebudayaan. Tulisannya yang berisi konsep-konsep dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan jumlahnya mencapai ratusan buah. Melalui konsep-konsep itulah ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia.

Pemerintah Belanda merintangi perjuangannya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932, tetapi belum dengan gigih memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu dapat dicabut. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, Raden Mas Soewardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara, dan semenjak saat itu beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Dalam zaman Pendudukan Jepang, kegiatannya di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan.

Waktu Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) di tahun 1943, Ki Hadjar duduk sebagai seorang pimpinan di samping Ir Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan Kh. Mas Mansyur. Setelah zaman kemerdekaan, Ki Hadjar pernah

menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada tahun 1957, Ki Hadjar menerima gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Gajah Mada. Beliau meninggal dunia pada 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana.

Guna menghormati nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan nasional, Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1959 menetapkan beliau sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dan tanggal kelahirannya kemudian dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Pihak penerus Perguruan Taman Siswa, sebagai usaha untuk melestarikan warisan pemikiran beliau, mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Dalam museum terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional.

Ki Hadjar Dewantara memang tidak sendirian berjuang menamamkan

jiwa merdeka bagi rakyat melalui bidang pendidikan. Namun telah diakui dunia bahwa kecerdasan, keteladanan dan kepemimpinannya telah menghantarkan dia sebagai seorang yang berhasil meletakkan dasar pendidikan nasional Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia, nama Ki Hadjar Dewantara tercatat sebagai salah seorang tokoh pergerakan nasional dengan pemikiran-pemikiran *antikoloniasme* dan *antifeodalisme*. Salah satu warisan pentingnya adalah sekolah Taman Siswa dan sistem pendidikan yang membebaskan rakyat bumiputera dari cengkeraman kolonial. Tak hanya itu, pemikiran-pemikiran Ki Hadjar tentang kebudayaan nasional turut mewarnai perdebatan kaum intelektual bumiputera di paruh awal abad ke-20 dan menjadi basis bagi pembentukan rasa kebangsaan Indonesia.

B. KRITIK TERHADAP PENDIDIKAN KOLONIAL

Gagasan-gagasan utama Ki Hadjar tentang pendidikan dan pengajaran ini lahir dalam konteks pergulatannya sebagai aktivis politik dan salah satu sendiri *Indische Partij* (IP) selain pengasuh surat kabar berbahasa Belanda *de Express* dan

bahasa Jawa Punggah. Gagasan tentang pendidikan yang memerdekakan lahir atas pengamatannya terhadap system pengajaran kolonial. Menurut dia, pendidikan dan pengajaran kolonial menjatuhkan rakyat Hindia Belanda dari realitas sehari-hari penindasan kolonial dan itu berarti menghapus kesadaran akan kemerdekaan dari penjajahan Belanda.

Menurut dia lagi, politik etis yang mendorong pengembangan pendidikan untuk bumiputera sesungguhnya telah menciptakan ketergantungan rakyat Hindia Belanda kepada pejaahnya. Dengan politik etis, rakyat bumiputera menjadi terbiasa ditolong sehingga kehilangan kepercayaan pada dirinya, bahkan kepada peradabannya sendiri.

Kritik atas sistem pendidikan kolonial ini diberi bentuk konkret oleh Ki Hadjar dengan membangun perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922, meskipun pada awalnya perguruan ini dianggap sebagai gerakan tidak politis oleh beberapa tokoh politik Hindia Belanda maupun oleh pemerintah kolonial, dalam waktu tidak terlalu lama banyak sekolah-sekolah partikelir bergabung dengan Taman Siswa. Pada tahun 1930, tidak kurang dari 52 sekolah Taman Siswa dengan 6.500 murid di Jawa, Sumatera, Bali dan Kalimantan. Delapan tahun

kemudian, Taman Siswa berkembang menjadi 225 sekolah dengan 700 guru dan 17.000 murid.

Ketertarikan banyak orang di masa itu untuk menyekolahkan anaknya di Taman Siswa didorong oleh sistem pengajaran yang menekankan pada kemerdekaan anak didik. Berbeda dengan sistem pendidikan barat yang juga dianut oleh pemerintah kolonial, Taman Siswa mendidik murid-muridnya upaya berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka di dalam batas-batas tujuan untuk mencapai hidup tertib bersama. Sebaliknya, pada saat itu, karakter pengajaran kolonial menekankan pada perintah, hukuman, dan ketertiban (*regering, tucht orde*).

Kritik lainnya menyangkut dasar kerakyatan yang tidak dimiliki oleh pendidikan kolonial. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah-sekolah kolonial adalah nilai yang berkaitan dengan kemajuan kaum kapitalis menumpuk materi. Maka, kalangan pribumi tertanam kuat budaya *ambtenaar*, menjadi pegawai gubernemen yang bergaji tinggi dan lupa kepada kelompok besar masyarakat yang miskin. Taman Siswa menjalankan asas kerakyatan yang membuat pendidikan dan pengajaran berguna bagi lapisan besar masyarakat pribumi. Penyakit

individualisme yang memisahkan satu orang dengan orang lain digantikan dengan nilai-nilai keluarga.

Nilai-nilai kekeluargaan atau kolektif ini dikemukakan Ki Hadjar bukan untuk menghilangkan kemerdekaan. Sebaliknya, di dalam hidup merdeka seseorang harus ingat bahwa ia hidup bersama orang lain yang juga berhak menuntut kemerdekaan diri. Oleh karena itu, pengajaran nilai kolektif dimaksudkan untuk memberi kesadaran tentang kehidupan bersama dalam persatuan masyarakat.

Nilai kebebasan dari kolektivitas yang dijunjung Ki Hadjar ini terungkap pula di dalam salah satu artikelnya tentang pendidikan dan pengajaran untuk golongan minoritas yang ditulis setelah kemerdekaan. Di dalam artikel ini Ki Hadjar mengemukakan persoalan apakah yang harus dilakukan terhadap golongan minoritas dalam hal pendidikan dan pengajaran.

Sebagai sebuah negara merdeka yang berdasar demokrasi, pengertian minoritas sangatlah berbau kolonial. Di dalam negara merdeka seharusnya hanya ada perbedaan antara warga negara dan orang asing. Oleh karena itu, negara seharusnya memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk pemberian pengajaran. Pemerintah

harus mengusahakan pengajaran umum yang nasional dan demokratis sementara golongan-golongan partikelir bebas mendirikan sekolah-sekolah guna memelihara ideologi masing-masing. Pemerintah hanya bertugas memberi bantuan secukupnya dan mengawasi agar tiap golongan tidak mengabaikan kepentingan golongan lainnya.

C. PEMIKIRAN FILOSOFIS KI HADJAR DEWANTARA TENTANG PENDIDIKAN

Pada jaman kemajuan teknologi sekarang ini, sebagian besar manusia dipengaruhi perilakunya oleh pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi (teknologi informasi) yang dibuat manusia untuk membantu manusia tidak lagi dikuasai oleh manusia tetapi sebaliknya manusia yang terkuasai oleh kemajuan teknologi. Manusia tidak lagi bebas menumbuhkembangkan dirinya menjadi manusia seutuhnya dengan segala aspeknya. Keberadaan manusia pada zaman ini seringkali diukur dari "to have" (apa sama materi yang dimilikinya) dan "to do" (apa saja yang telah berhasil/tidak berhasil dilakukannya) daripada keberadaan pribadi yang bersangkutan ("to be" atau "being"-nya).

Dalam pendidikan perlu ditanamkan sejak dini bahwa keberadaan seorang pribadi, jatuh lebih penting dan tentu tidak persis sama dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang telah dilakukannya. Sebab manusia tidak sekedar pemilik kekayaan dan juga menjalankan suatu fungsi tertentu. Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang (menurut Ki Hadjar Dewantara menyangkut apa daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif). Singkatnya, "educate the head, the heart, and the hand!"

Di tengah-tengah maraknya globalisasi komunikasi dan teknologi, manusia makin bersikap individualis. Mereka "gandung teknologi", asyik dan yang serba canggih, sehingga cenderung melupakan kesejahteraan dirinya sendiri sebagai pribadi manusia dan semakin melupakan aspek sosialitas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran hendaknya diperbaiki sehingga memberi keseimbangan pada aspek individualitas ke aspek sosialitas atau kehidupan kebersamaan sebagai masyarakat manusia. Pendidikan dan pembelajaran hendaknya juga dikembalikan kepada

aspek-aspek kemanusiaan yang perlu ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik.

Ki Hadjar Dewantara, pendidik asli Indonesia, melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya. Menurutny manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangannya manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan oleh rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis dan manusiawi.

Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu adalah berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan

mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku pepatah: "Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya". Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budaya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat yang melingkupinya.

Ki Hadjar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke pndita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spritual ke guru spritual yang berjwa kesatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara.

Bagi Ki Hadjar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figure keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu,

nama Hadjar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hadjar adalah seseorang yang memiliki kelebihan dan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidikan merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan.

Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan Taman Siswa. Merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Landasan

filosofinya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (*natural law*), segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia.

Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan, pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri; setiap orang harus hidup sederhana dan guru

hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain.

Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (*care and dedication based on love*). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala sapek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu bagi Ki Hadjar Dewantara pepatah ini sangat tepat yaitu "educate the head, the heart, and the hand".

Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator), dalam hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, pihak

terkait); segi administrasi sebagai guru; dan sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesionalis itu meliputi perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan; menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang professional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang professional, produktif dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.

D. HARMONI DAN AMONG

Tiap-tiap Orang djadi Guru; tiap-tiap Rumah djadi Perguruan! Demikian bunyi semboyan yang tertulis dalam salah satu artikel dalam buku berjudul *Karya Ki Hadjar Dewantara*, bagian I, Pendidikan yang diterbitkan oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa pada tahun 1962. di bawahnya, tertulis judul artikel mobilisasi intelektual nasional untuk mengadakan wajib belajar. Semboyan ini, seperti diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara, menganjurkan

suatu gerakan mobilisasi untuk belajar bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Mobilisasi intelektual yang dimaksud di sini adalah mengerahkan seluruh sumber daya manusia yang ada untuk memberi pengajaran kepada anak-anak bumiputera. Anjuran ini merupakan cita-cita pendiri perguruan Taman Siswa itu untuk memajukan pendidikan rakyat bumiputera di negeri kolonial Belanda.

Buku dengan ketebalan mencapai 557 halaman ini, merupakan buku kumpulan 116 tulisan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang pernah diterbitkan oleh surat kabar, majalah, ataupun pernah dibacakan sebagai pidato selama kurun waktu tahun 1928 hingga tahun 1954. artikel-artikel ini ditulis dalam bahasa Melayu, Belanda dan Jawa. Untuk keperluan penerbitan, artikel berbahasa Belanda dan Jawa juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini sendiri merupakan buku pertama dari dua buku lainnya yang berisi kumpulan tulisan Ki Hadjar. Buku kedua berisi kumpulan tulisan mengenai kebudayaan sedangkan buku ketiga tentang politik, jurnalistik, dan kemasyarakatan.

Gagasan Ki Hadjar tentang pendidikan dikelompokkan menjadi tujuh bab di dalam buku ini yaitu bab tentang pendidikan nasional, politik

pendidikan, pendidikan anak-anak, pendidikan kesenian, pendidikan keluarga, ilmu jiwa, ilmu adab, dan bahasa. Tiap bab berisi antara 8 sampai 39 judul artikel, dengan jumlah artikel terbanyak dalam kelompok bab tentang politik pendidikan. Memang, gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan tak bisa dilepaskan dari konteks politik pendidikan yang berlaku pada masa tersebut yaitu politik pendidikan nasional.¹

Secara garis besar, Ki Hadjar Dewantara mengemukakan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan fisik seseorang. Ketiga elemen ini, menurut dia tak dapat dipisah-pisahkan supaya tercapai kesempurnaan hidup. Dalam kaitan dalam pendidikan nasional, daya upaya memajukan tiga elemen ini hendaknya berlandaskan garis hidup bangsanya atau berdasarkan kebudayaan bangsanya ditujukan untuk mengangkat derajat serta memerdekakan manusia sebagai anggota sebuah persatuan (bangsa). Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah berdiri sendiri (*zelfstanding*), tidak bergantung kepada orang lain (*onafhankelijk*), dan dapat mengatur dirinya sendiri (*verrijheid, zelfbeschikking*). Lebih jauh, dalam hidup merdeka tersebut, Ki Hadjar

menekankan pentingnya harmoni yaitu suatu keadaan persatuan yang selaras. Untuk mencapai ini, masing-masing anggota persatuan harus ingat bahwa ia hidup bersama-sama dengan orang lain yang juga berhak menuntut kemerdekaannya. Oleh karena itu, golongan yang berbeda harus mengatasi perbedaan tersebut dan mementingkan peri kehidupan bersama.

Selain itu, pengajaran yang diberikan kepada anak didik tidak bersifat paksaan bahkan perilaku memimpin kadang tidak perlu dilakukan. Sebagai gantinya, para pendidik harus bersikap ngemong atau among. Para guru seharusnya tidak mengajarkan pengetahuan mengenai dunia secara dogmatik. Sebaliknya, mereka hanya berada di belakang anak didik sambil memberi dorongan untuk maju, secara halus mengarahkan ke jalan yang benar, dan mengawasi kalau-kalau anak didik menghadapi bahaya atau rintangan. Anak didik harus memiliki kebebasan untuk maju menurut karakter masing-masing dan untuk mengasah bati nuraninya.

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang berisi Ing Ngarso Sung Tulodho (didepan memberi contoh), Ing Madyo Mangun Karso (di tengah membangun semangat), dan Tut Wuri Handayani

(dibelakang mengawasi) cukup relevan dalam membangun kesadaran bangsa ini akan pentingnya pendidikan. Mari kita tinjau penafsiran semboyan tersebut. Penafsiran semboyan tersebut menjadi amat sempit, yaitu dianggap hanya berlaku bagi pendidikan formal, dan hanya wajib dilakukan oleh para guru. Padahal, di zaman sekarang ini, disaat kebebasan menjadi hak individu, siapapun seharusnya dapat menerapkan semboyan tersebut dalam hidupnya. Pandangan Ki Hadjar Dewantara (1950) sebagai berikut :

"Taman Siswa mengembangkan suatu cara pendidikan yang tersebut didalam Among dan bersemboyan 'Tut Wuri Handayani' (mengikuti sambil mempengaruhi). Arti Tut Wuri Handayani adalah mengikuti, namun maknanya ialah mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa, dan makna Handayani ialah mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, memberi teladan agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi"

Demikian bagi Ki Hadjar Dewantara pendidikan pada skala mikro tidak terlepas dari pendidikan dalam arti makro, bahkan disiplin pribadi adalah tujuan dan cara dalam mencapai disiplin

yang lebih luas. Ini berarti bahwa landasan pendidikan terdapat dalam pendidikan itu sendiri, yaitu faktor manusianya. Dengan demikian landasan-landasan pendidikan tidak mesti dicari diluar fenomena (gejala) pendidikan termasuk ilmu-ilmu lain atau filsafat tertentu dari budaya barat. Oleh karena itu data ilmu pendidikan tidak tergantung dari studi ilmi psikologi, fisiologi, sosiologi, antropologi atau filsafat. Lagi pula konsep pengajaran (yang makro) berdasarkan kurikulum formal tidak dengan sendirinya bersifat inklusif dan atau sama dengan mengajar. Bahkan dalam banyak hal pengajaran itu tergantung hasilnya dari kualitas guru mengajar dalam kelas masing-masing. Sudah barang tentu asas Tut Wuri Handayani tidak akan menjadikan pengajaran identik dengan sekedar upaya sadar menyampaikan bahan ajar dikelas kepada rombongan siswa mengingat guru harus berhambanya kepada kepentingan siswanya.

E. KONSEP TRI-KON

Sudah sejak lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum dan pendidikan di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu

pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, Ki Hadjar Dewantara (1936, 1945, 1946) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor yang penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa.

Di buku kumpulan karya Ki Hadjar tersebut, ia menguraikan arti dasar kebudayaan sebagai buah budi manusia. Kata kebudayaan sendiri berasal dari kata *cultura* yang merupakan perbendaharaan bahasa Latin. Kata *cultura* itu merupakan perubahan dari kata *colere* yang berarti memelihara, memajukan serta memuja-muja. Ini berarti *cultura* tidak saja mengandung arti buah budi manusia, tetapi yang juga penting adalah arti memelihara dan memajukan. Itulah yang, menurut Ki Hadjar menjadi tujuan dari segala usaha kultural.

Tujuan memelihara dan memajukan kehidupan manusia sering kali harus berhadapan dengan kekuatan alam yang menghambat ataupun pengaruh zaman yang merintangai usaha manusia tersebut. Ketika berjuang menghadapi kekuatan alam dan pengaruh zaman itu, manusia melahirkan kebudayaan baru. Dengan demikian, kebudayaan juga merupakan hasil perjuangan manusia dalam menaklukkan rintangan alam dan menyesuaikan diri dengan pengaruh zaman atau

masyarakatnya. Selain itu, kebudayaan tidak mempunyai bentuk abadi, tetapi terus-menerus berganti wujudnya karena perubahan alam dan zaman. Kebudayaan yang hidup di zaman lampau memajukan kehidupan manusia, boleh jadi di jaman sekarang justru mempersulit manusia. Zaman dahulu, misalnya arca-arca sangat berfaedah sebagai alat pendidikan. Saat ini arca-arca itu hanya meninggalkan jejak-jejak kekunoan dan aspek keindahan.

Pemikiran tentang kebudayaan nasional menjadi bahasan yang sering muncul di dalam buku tersebut. Menurut Ki Hadjar, kebudayaan selalu mempunyai sifat nasional," karena rakyat yang menimbulkan kebudayaan tersebut ialah semua orang yang hidup di dalam satu lingkungan alam dan satu lingkungan zaman". Orang-orang itu, meskipun sebenarnya memiliki kebudayaan yang saling berbeda, tetapi mereka saling berhubungan sehingga mau tidak mau akan terjadi pertukaran kebudayaan.

Dalam kaitan dengan kebudayaan nasional, Ki Hadjar menuturkan bahwa kebudayaan nasional terbentuk dari puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, baik kebudayaan

lama maupun baru. Ia mencontohkan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa melayu. Meskipun demikian, bahasa-bahasa daerah lainnya, dalam perkembangannya, turut menyumbang pertambahan kosa kata bahasa Indonesia. Hal yang sama terjadi dilapangan kesenian di mana unsur-unsur seni tiap daerah bisa saling mempengaruhi satu sama lain.

Perkembangan kebudayaan nasional, menurutnya harus melalui jalan yang disebutnya tri-kon, yaitu memiliki kontinuitas dengan kebudayaan yang telah silam, menjalankan konvergensi dengan jalannya kebudayaan-kebudayaan lain, dan akhirnya bersifat konstris dalam persatuan dengan kebudayaan dunia walaupun tetap mempertahankan kepribadian sendiri. Konsep tri-kon ini harus menjadi pedoman dalam pergaulan dengan kebudayaan asing. Dengan demikian, kebudayaan nasional tidak akan meninggalkan kepribadiannya, namun juga terbuka terhadap kebudayaan lain.

F. POLEMIK KEBUDAYAAN

Gagasan-gagasan Ki Hadjar Dewantara tersebut memicu perdebatan dikalangan penggagas Pujangga Baru, terutama Sutan Takdir Alisyahbana (STA). Didalam artikelnya yang berjudul

Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru Indonesia "Prae-Indonesia, Sutan Takdir menolak gagasan tentang kebudayaan Indonesia yang merupakan kontinuitas dari kebudayaan masa silam. Menurut STA:

Indonesia yang dititit-titikan oleh generasi baru bukan sambungan Mataram, bukan sambungan keradjaan Banten, bukan keradjaan Minangkabau atau Banjarmasin. Kebudayaan Indonesia tiadalah mungkin sambungan kebudayaan Djawa, Melaju, Sunda atau Kebudayaan lainnya (Achdiat K. Mihadja, 1954).

Berbeda dengan Ki Hadjar yang mengusulkan untuk mengambil puncak-puncak kebudayaan daerah, baik lama ataupun baru, dan bersikap terbuka terhadap kebudayaan asing, STA menyakini bahwa kebudayaan Indonesia baru harus benar-benar bebas dari kebudayaan lama. Cita-cita masa depan bangsa menurutnya tidak berakar pada masa silam, melainkan pada harapan kemuliaan di kemudian hari. Ia juga menilai bahwa masyarakat kepulauan Nusantara ini telah beradab-adab statis, mati. Untuk mencapai cita-cita baru itu, mereka harus menjadi dinamis, hidup. Alat yang dapat dipakai untuk mencapai kondisi dinamis itu menurutnya adalah kebudayaan Barat.

Pemujaan kepada kebudayaan Barat oleh STA ini berangkat dari analisisnya terhadap kondisi rakyat bumiputera pada tahun 1930-an. Menurutny, semangat ke-Indonesiaan yang menghidupkan kembali bangsa Indonesia yang beradab-adab mati pada hakikatnya diperoleh dari Barat. Budi Utomo dilahirkan oleh orang-orang yang mendapat didikan Barat; cara organisasi yang dipakai untuk mengganti persatuan berdasar keturunan diadopsi dari Barat; para tokoh pergerakan nasional sebagian besarnya mendapat didikan atau pengaruh Barat.

Gagasan STA itu mendapat tantangan dari tokoh-tokoh seperti Sanusi Pane, Dr Sutomo, Purbatjaraka, Adinegoro, dan Ki Hadjar Dewantara sendiri. Sanusi Pane membantah bahwa zaman Indonesia tidak boleh dianggap terusan zaman pra-Indonesia. Menurutny, sejarah adalah rantai masa yang berada dibelakangnya. Manusia tidak dapat tiba-tiba menjadi dewasa tanpa melalui masa kanak-kanaknya. Hal itu sama artinya dengan mengadakan barang dari yang tidak ada, ia memberi contoh, Pujangga Baru lahir karena adanya Pujangga Lama. Tanpa adanya Pujangga Lama tidak akan lahir generasi baru yang merupakan hasil kritik terhadap generasi lama.

Perdebatan ini sering kali disederhanakan sebagai perdebatan antara kubu modernis dan kubu tradisional. Padahal, kita melihat lebih jauh, silang pendapat ini melibatkan tokoh-tokoh yang modernis; mereka menerima ilmu pengetahuan modern dan mengadopsi apa yang mereka pahami sebagai kebudayaan Barat. Mereka juga menentang tradisi feodalisme dan menolak jika kebudayaan Indonesia baru harus sepenuhnya diambil dari kebudayaan feodal ataupun mentah-mentah dari kebudayaan rakyat.

Perbedaan mendasar baru muncul ketika gagasan-gagasan ini dihubungkan dengan gerakan melawan kekuasaan kolonial. Tjipto Mengoenkosumo pernah menyatakan bahwa pertentangan fundamental itu bukan antara Timur dan Barat atau antara orang-orang Hindia dan non-Hindia, tetapi antara dominasi dan subordinasi, apa pun bentuknya. Pernyataan ini semakin jelas dengan argumen yang dikemukakan Ki Hadjar dalam menanggapi pandangan STA.

Ki Hadjar melihat bahwa pendidikan barat yang dilaksanakan di Hindia Belanda bersifat sangat elitis sehingga tidak menjangkau rakyat jelata. Pendidikan itu sendiri juga

berorientasi ke negeri Belanda. Akibatnya, elite bumiputera yang mengenyam pendidikan Belanda itu dijauhkan dari realitas bangsanya sendiri dan pada gilirannya akan mengumpulkan pembentukan kesadaran kolektif bangsa.

Lebih jauh lagi, menurut Ki Hadjar, tanpa kebanggaan dan pengetahuan yang cukup tentang masa lalu dan kebudayaan sendiri, apa yang bisa diharap selain ketundukan dan kekaguman berlebihan pada kebudayaan yang lebih berkuasa, kebudayaan sang penjajah.

Jelas bahwa yang diinginkan Ki Hadjar bukan sekadar membanggakan kebudayaan masa silam sambil membuka diri kepada kebudayaan asing. Lebih jauh, Ki Hadjar menganggap penting adanya perkawinan budaya yang demokratis antara pihak-pihak yang berasimilasi. Tanpa demokrasi, yang terjadi adalah kemunduran dan kematian salah satu kebudayaan, atau penjajahan satu kebudayaan oleh kebudayaan lainnya.

G. PEMIKIRAN KI HADJAR DEWANTARA DAN KONDISI PENDIDIKAN INDONESIA MASA KINI

Saat ini anak usia sekolah di Indonesia banyak yang tertampung di

sekolah-sekolah formal. Penyebab tidak tertampungnya anak usia sekolah disekolah formal, tidak hanya pada akar faktor kemiskinan semata. Paling tidak, ada tiga pilar penyangga utama dunia pendidikan yang merupakan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, yang disebut Tri Pusat Pendidikan yakni, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat mempengaruhi permasalahan tersebut.

Pertama, lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan formal yang berjalan secara alamiah antara orangtua dan anak, dimana orangtua sering memaksakan kehendak kepada anak, agar sekolah anaknya sesuai dengan pilihannya, akhirnya di tengah perjalanan si anak tidak mampu mengikuti ataupun ada keengganan untuk melanjutkan pendidikannya, karena tujuan anak "tidak nyambung" dengan pilihan orangtua. Di samping itu, keadaan ekonomi keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, menjadi kendala masuk ke sekolah formal.

Kedua, berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dalam penempatan sekolah, dimana suatu wilayah yang terbatas kepemilikan tanah, ataupun kondisi geografis wilayah dengan penduduk yang tidak padat (daerah terpencil), penempatan

sekolah relatif jauh. Penempatan sekolah itu sering dijumpai pada jenjang pendidikan SMP, sehingga masyarakat enggan menyekolahkan anaknya.

Kondisi itu menyebabkan ketidakmampuan masyarakat. Begitu pula penempatan sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK belum banyak yang mencerminkan kebutuhan potensi yang dimiliki suatu wilayah kecamatan. Misalnya di daerah kawasan wisata ataupun kelautan, mestinya ditempatkan sesuai dengan potensi wilayah tersebut, namun karena merupakan program dari pemerintah, masyarakat hanya menerima apa adanya.

Ketiga, masyarakat lingkungan pendidikan hendaknya didukung peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan agar dibutuhkan dalam memajukan pendidikan. Terbukti semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin tinggi partisipasi dalam berhubungan.

Guna memecahkan permasalahan antara kemiskinan dan peluang tertampung pada sekolah formal, pertama, permasalahan lingkungan keluarga, hendaknya antara anak dan orangtua jauh-jauh hari telah memikirkan pendidikan ke depan sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri. Sedangkan untuk masalah biaya

pendidikan hendaknya pemerintah dengan sungguh-sungguh merealisasikan anggaran APBN ataupun APBD sebesar 20 persen sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat 4, UUD 1945, di samping meneruskan program pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik untuk SMP maupun SMA/SMK, bantuan peningkatan mutu pendidikan DBEP (development base education project), program beasiswa dan school grant. Tetapi dalam meningkatkan mutu pendidikan anak, yang terpenting adalah biaya pengadaan buku-buku pelajaran dengan tidak memprioritaskan pembelian buku-buku yang hanya di ujian nasional (UN)-kan, karena buku mata pelajaran yang lain juga menjadi kebutuhan siswa itu sendiri.

Kedua, kebijakan pemerintah menempatkan sekolah SMP, ataupun SMA/SMK hendaknya mempertimbangkan kondisi wilayah pendukung sekolah itu. Seperti program pendidikan yang dikembangkan tahun pelajaran 2006/2007 ini, adanya pengembangan sekolah satu atap SMP, yang bertujuan menuntaskan wajib belajar (wajib) pendidikan dasar (dikdas) sembilan tahun, yang merupakan solusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ke

depan, program pendidikan satu atap bisa diteruskan pada jenjang pendidikan SMA/SMK, tentunya sesuai dengan kebutuhan program potensi wilayah. Pengembangan pendidikan formal ini lebih efektif dan efisien untuk diterapkan, sehingga mereka yang berada di garis kemiskinan terbantu dengan program pendidikan satu atap dibanding membangun sebuah sekolah baru yang biayanya tidak sedikit, tanpa meninggalkan program yang telah ada.

Di samping itu, program sekolah satu atap, salah satu program pendidikan yang memiliki korelasi dengan UU RI No. 14/2005 tentang guru dan dosen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan guru (D4 dan S1), karena guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan di SD ataupun SMP dapat dimanfaatkan mengajar dan mendidik siswa di sekolah formal (tingkat SMA/SMK), anak usia sekolah tidak saja mengikuti Wajar Didkas SMPA tetapi juga Wajar SMA/SMK, yang merupakan investasi sumber daya manusia yang tangguh dan berhasil guna, guna mengenyam pendidikan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, Ki Hadjar, 1936, *Dasar-Dasar Pendidikan*, dalam karya Ki Hadjar Dewantara *Bagian*

Pertama: Pendidikan, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dewantara, Ki Hadjar, 1945, *Pendidikan dalam Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama : Pendidikan Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa*.

Dewantara, Ki Hadjar, 1946, *Dasar-dasar pembaharuan pengajaran, dalam Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa*.

Dewantara, Ki Hadjar, 1946, *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian I: Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Majelis Persatuan Taman Siswa.

Dewantara, Ki Hadjar, 1950, *Dasar-Dasar Perguruan Taman Siswa*, DIY: Majelis Luhur.

Dewantara, Bambang Sokawati, 1989, *Ki Hadjar Dewantara, Ayahku*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1989, *Ki Hadjar Dewantara: Dalam Pandangan Para Cantrik dan Mentriknnya*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Mihardja, Achdiat K., 1954, *Polemik Kehidupan*.